

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Aan Andriani, *Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama pada Dokumen Kependudukan*, Jurnal Rechtvinding, Jakarta, 2009, h.1.
- Badan Kongres Kebathinan Indonesia, *Hasil Seminar Kebathinan Indonesia ke-1 Jakarta*, (Jakarta : Badan Kongres Kebathinan Indonesia, 1959).
- Gatot Supramono, SH, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998.
- Wijayanti Winda, *Penghayat Kepercayaan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, h. 5
- IGN Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia : Peran Polisi, Bakorpakem dan Pola Penanggulangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h.53.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Majalah Konstitusi; Elemen Data Kependudukan Penghayat Kepercayaan, Nomor 129 edisi November 2017*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontituti, 2017).
H.3
- Susetyo Heru, *Pencatatan Perkawinan bagi Golongan Penghayat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI, Jakarta, 1997.
- Rahmat Subagya, *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama*, Yogyakarta, Kanisius, 1976.
- Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* Republik Indonesia 1945, Jakarta, Siguntang, 1971.

Ruyandi, Masalah Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (Jakarta: Departemen P dan K Dirjen Kebudayaan Direktorat PPK, 1985, h. 10. Dalam Nurdjana

Siti Malikhatun Badriyah, Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, h.17.

Winda Wijayanti, 'Penghayat Kepercayaan, Perlindungan Hukum Melalui Hukum Administrasi', Rajawali Pers, Depok

ARTIKEL

Hani Adhani, *Penghayat Kepercayaan Didiskriminasi?*, Antara News, diakses dari <https://kl.antaranews.com/berita/3431/penghayat-kepercayaan-didiskriminasi>.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, tanggal 22 Maret 1973.